

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, seperti menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, dan menimbulkan kecurangan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Tindakan kecurangan akuntansi saat ini cukup memprihatinkan dan bisa terjadi di organisasi mana saja termasuk di instansi pemerintahan. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Bahkan, kecurangan akuntansi menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun. Adapun beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan antara lain: manipulasi, pencatatan yang sengaja dipersalahkan, penghilangan surat-surat, dan *mark-up* yang dapat memengaruhi keuangan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Indonesian Corruption Watch, ditemukan fakta di tahun 2015 dimana terdapat 134 kasus penggelapan anggaran yang merugikan negara sebesar Rp.803,3 Miliar. Kemudian pada tahun yang sama terjadi 167 kasus korupsi dilakukan oleh pejabat dan pegawai lingkup pemerintah daerah dan kementerian. Pada fenomena terbaru, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan tren penegakan korupsi Semester 1 pada tahun 2021 dan menunjukkan adanya keterlibatan 162 ASN dalam kasus korupsi. Dalam laporan yang sama, ICW menyebut sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan oknum ASN terjadi pada proses pengadaan barang dan pembukuan

yang bermasalah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kecurangan dan korupsi tertinggi di dunia. Keadaan ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak banyak berubah, sehingga dibutuhkan pencegahan di dalam menekan kasus-kasus tersebut.

Adapun faktor kecurangan akuntansi juga terjadi di sektor pemerintah. Beberapa akhir ini terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan 14 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Para oknum tersebut dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat setelah terlibat kasus korupsi. Selanjutnya, tercatat adanya 114 kasus tindak pidana korupsi di Jawa Timur, dimana terdapat sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur. Data SPI 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor total rerata nilai 75,24 yang didapatkan dari rerata nilai komponen internal dan eksternal, yang mana skor ini masuk ke dalam kategori waspada. (sumber: <https://www.detik.com/>,2023)

Fenomena lainnya diperkuat dengan banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan ASN yang berada di Instansi Pemerintahan dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek kasus pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang membawa mantan kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang (<https://jatim.antaranews.com>,2023). Selanjutnya, kasus temuan terkait kegagalan perbedaan data realisasi program dana BOS yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati 2022 yang membawa instansi BPPKAD Kabupaten Sampang. Hal-hal ini mengindikasikan rentannya penyalahgunaan dan kecurangan pada aspek

pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, penting untuk menekankan aspek pencegahan kecurangan pada sektor pemerintah.

Pada dasarnya kecurangan merupakan suatu hal yang menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, pencegahan kecurangan akuntansi sangat penting untuk diterapkan diorganisasi maupun di instansi pemerintahan, supaya meminimalisir terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan akuntansi merupakan suatu upaya yang menekan untuk terjadinya faktor-faktor dari kecurangan. Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan akuntansi. Adapun faktor tersebut adalah pengendalian internal, pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi.

Menurut Mulyadi (2016:129) pengendalian internal adalah kebijakan, praktik dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan terkait keandalan catatan dan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan mengukur kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian internal diperlukan agar mencegah terjadinya kecurangan akuntansi di lembaga. Jika pengendalian internal

lembaga lemah, kesalahan akan terjadi dan jumlah kasus penipuan akan semakin tinggi. Di sisi lain, jika pengendalian internal kuat, kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalkan dan kesalahan kecurangan tetap terjadi, namun dapat diidentifikasi dengan cepat dan tindakan korektif dilakukan sesegera mungkin. Mengamankan aset perusahaan melalui pembukuan. Kebutuhan akan pemantauan pengendalian internal digunakan untuk memastikan pengendalian

internal dapat berjalan efektif atau tidak. Organisasi atau instansi pemerintahan harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mengurangi pencegahan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian dari Novitasari & Kusumastuti (2019) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengembangan mutu karyawan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena dengan meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai akan terciptanya instansi yang aman dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan. Sebuah organisasi memiliki teknologi yang terbaik, sistem yang terbaik dan memiliki cara kerja organisasinya memfokuskan pada mutu tetapi integritas pribadi pekerja tidak terfokus pada kualitas kerja terbaik maka hasil akhirnya tidak akan sesuai. Mutu karyawan dikembangkan dengan integritas yang tinggi supaya organisasi maupun sistem dalam manajemen dapat berjalan baik. Dengan begitu pencegahan kecurangan akuntansi dalam instansi telah berhasil diterapkan. Hasil penelitian dari Andreas et al. (2020) menunjukkan bahwa pengembangan mutu karyawan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Salah satu faktor yang memberi pengaruh pada kecurangan akuntansi yaitu adanya ketaatan aturan akuntansi. Jika aturan instansi tinggi, maka tingkat kecurangan akuntansi semakin rendah. Ketaatan aturan akuntansi dijadikan sebagai presentase kesesuaian prosedur aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan serta semua bukti pendukung yang sesuai dengan aturan BPK. Ketaatan aturan akuntansi dapat dikatakan semua kewajiban dalam

organisasi maupun instansi untuk memenuhi segala ketaatan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Hasil penelitian dari Sari et al. (2021) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Kesesuaian kompensasi dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian imbalan yang diterima pegawai dengan yang dikerjakan sehingga mengakibatkan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Namun, apabila kesesuaian kompensasi terpenuhi dengan maksimal akan menyebabkan kepuasan individu itu sendiri dan tidak menimbulkan dorongan untuk melakukan kecurangan. Dengan hal ini pencegahan kecurangan akuntansi di instansi pemerintahan dapat dikatakan berhasil. Hasil penelitian dari Kuntadi et al. (2022) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi.

Mengingat tingginya laporan kecurangan yang terjadi pada ASN di Jawa Timur, maka peneliti akan mengangkat topik pencegahan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintahan, khususnya pada BPPKAD Kabupaten Sampang. BPPKAD merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. BPPKAD berfungsi sebagai penyusun kebijakan, pelaksanaan teknis pelaporan milik daerah. BPPKAD Kabupaten Sampang dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No.5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dan

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

Peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pencegahan kecurangan pada BPPKAD, mengingat rentannya indikasi penyalahgunaan pada pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Berdasarkan fenomena hasil pemaparan diatas maka penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan akuntansi. Maka peneliti melakukan pengujian dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal, Pengembangan Mutu Karyawan, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Menurut uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang?
2. Apakah pengembangan mutu karyawan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang?
3. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang?

4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan akutansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan akutansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan akutansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang
3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan akutansi pada BPPKAD Kab.Sampang
4. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan akutansi pada BPPKAD Kabupaten Sampang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk peneliti, namun juga bagi pihak-pihak lainnya. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori terkait. Pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangann akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPPKAD Kabupaten Sampang mengenai pengaruh pengendalian internal,

pengembangan mutu karyawan, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Sehingga, dapat meningkatkan akuntabilitas.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang ilustrasi yang memberikan pola pikir dasar untuk keseluruhan termasuk latar belakang, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rencana penelitian, dan sistem penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang dipergunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini terbagi dalam sub bab yang terdiri dari gambaran penelitian, analisis data serta pembahasan



**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan juga saran

